BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertama kalinya munculnya perbankan syariah yaitu di mesir pada tahun 1963. Sedangkan di indonesia sendiri perbankan syariah pertama kali muncul pada tahun 1991 dan secara resmi di operasionalkan pada tahun 1992. Dalam catatan sejarah mengatakan bahwa gagasan mendirikan bank yang berprinsip syariah sudah muncul sejak indonesia belum merdeka yakni pada awal tahun 30-an oleh para cendekiawan-cendekiawan islam indonesia, walaupun pada akhirnya terleasisasi juga pada tahun yang jauh sesudahnya. Secara resmi legalisasi perbankan syariah telah dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, dan juga dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004. Bank Indonesia secara intensif sejak tahun 2002 hingga sekarang terus melakukan regulasi terhadap aktivitas perbankan syariah di Indonesia.

Indonesia yang sebagian besar penduduknya adalah muslim menjadi pasar yang terbesar di dunia untuk membuat bank yang berprinsip syariah. Besarnya penduduk muslim di indonesia memberikan ruangan yang cukup lebar bagi perkembangan bank syariah di indonesia. Dengan pesatnya bank syariah di Indonesia kini di ikuti juga oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang berbentuk Koperasi Jasa Kuangan Syariah (KJKS), Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) atau yang sering disebut Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah lembaga keuangan yang memberikan penyaluran dana dalam bentuk kredit. Kredit tersebut dapat diberikan kepada masyarakat, wirausaha, atau pengusaha mikro yang memerlukan dana. Konsep BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, merupakan konsep pengelolaan dana simpan-pinjam di tingkat komunitas

yang bertumpu pada pengelolaan sumber daya di tingkat pemerintahan administrasi terendah yaitu desa. Karena BMT Berbadan Hukum Koperasi yang memilih prinsip "DARI ANGGOTA OLEH ANGGOTA DAN UNTUK ANGGOTA".

Dengan prinsip itu BMT pun sangat berpihak kepada masyarakat menengah ke bawah karena program bmt dibuat untuk memudahkan masyarakat menengah ke bawah untuk mendapatkan kredit. Tetapi dalam penyaluran pembiayaan di BMT pun tidak selamanya lancar ada kalanya penyaluran pembiayaan mengalami hambatan. Hambatan yang di alami pada BMT yaitu adanya masalah dalam pembiayaan, kegagalan pembayaran pembiayaan atau pembiayaan macet. Kegagalan dan masalah yang terjadi itu biasanya disebabkan karena pihak anggota maupun BMT. Oleh karena itu untuk pencegahan kegagalan dan masalah yang terjadi di BMT salah satunya dengan cara di terapkannya pengendalian intern yang handal dan efektif untuk operasionalnya terutama pada proses pencairan pembiayaan. Pengendalian intern terhadap pembiayaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah antara anggota dan BMT, mencega kegagalan pembiayaan dan pembiayaan bermasalah. Khususnya pada pembiayaan murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati.

Pengendalian Intern merupakan proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG (*Those Charged With Governance*) yang berfungsi untuk pengawasan pada tatanan atas dalam entitas itu untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan, manajemen, dan karyawan lain untuk menangani risiko bisnis dan risiko kecurangan yang diketahui (*identified business and fraud risks*) mengancam pencapaian tujuan entitas, seperti pelaporan keuangan yang andal. Pengendalian intern bertujuan membuat laporan keuangan bebas dari salah saji material, yang dibebaskan oleh kesalahan (*error*) maupun kecurangan (*fraud*). Pengendalian intern juga merupakan jawaban manajemen untuk menangkal risiko yang diketahui, atau dengan perkataan lain, untuk mencapai suatu tujuan pengendalian (*control objective*).

Pengendalian intern ini dilakukan untuk mengontrol pembiayaan di BMT Al-Hikmah khususnya pembiayaan murabahah.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dan pihak lain yang mewajibkan pihak lain yang dibiayi untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam murabahah ditentukan beberapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin di peroleh).

Atas dasar hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisis tentang aktifitas pengendalian intern terhadap pelaksanaan pembiayaan murabahah yang ada pada BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Karang Jati, yang berjudul **“ANALISIS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BMT AL-HIKMAH UNGARAN CABANG KARANG JATI.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Pertimbangan apa saja yang dilakukan BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Karangjati untuk menyetujui pengajuan suatu pembiayaan Murabahah?
2. Masalah dan kendala apa yang di hadapi BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati dalam pengadaan pembiayaan murabahah?
3. Bagaimana pengendalian intern BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati terhadap pembiayaan murabahah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang di lakukan oleh BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati terhadap pengajuan suatu pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi oleh BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati dalam pengadaan pembiayaan murabahah.
3. Untuk mengetahui penerapan pengendalian intern BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati terhadap pembiayaan murabahah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat laporan tugas akhir ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai persyaratan kelulusan diploma DIII di Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang
 - b. Mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah ke aktivitas langsung di lapangan.
2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang
 - a. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang khususnya Program Studi D III kepada masyarakat luar.
 - b. Menambah referensi literatur mengenai magang yang dilakukan mahasiswa di BMT masing-masing
3. Bagi BMT
 - a. Diharapkan menjadi bahan masukan terhadap peningkatan mutu dan jasa pada BMT tersebut.
 - b. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk lebih memperbaiki aktivitas pengendalian intern agar pembiayaan murabahah yang

diberikan tidak mengalami kendala atau kredit macet.

2. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan wawasan terhadap pembiayaan murabahah pada BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Karangjati, serta sebagai pengetahuan pengendalian intern yang di lakukan bmt untuk pembiayaan murabahah kepada calon anggota dan anggota di BMT Al-Hikmah Ungaran.